



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA

PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
(RENJA-PD)  
TAHUN 2022

TONDANO, AGUSTUS 2022

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan program , kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja bidang/unsur pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Harapan kami bahwa Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 akan menjadi acuan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Penganggaran serta implementasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah.

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,



MAUDY N. LONTAAN, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661115 198602 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal.	
DAFTAR ISI	i	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	30
	2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	39
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH	50
BAB IV	PENUTUP	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja-PD merupakan hasil penyempurnaan dari rancangan Renja PD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD, yang disusun dan dirumuskan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan PD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal PD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja PD, mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan PD, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan PD;
2. Organisasi dan tatalaksana PD;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra PD;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan PD;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan PD;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;
10. Informasi lain terkait pelayanan PD.

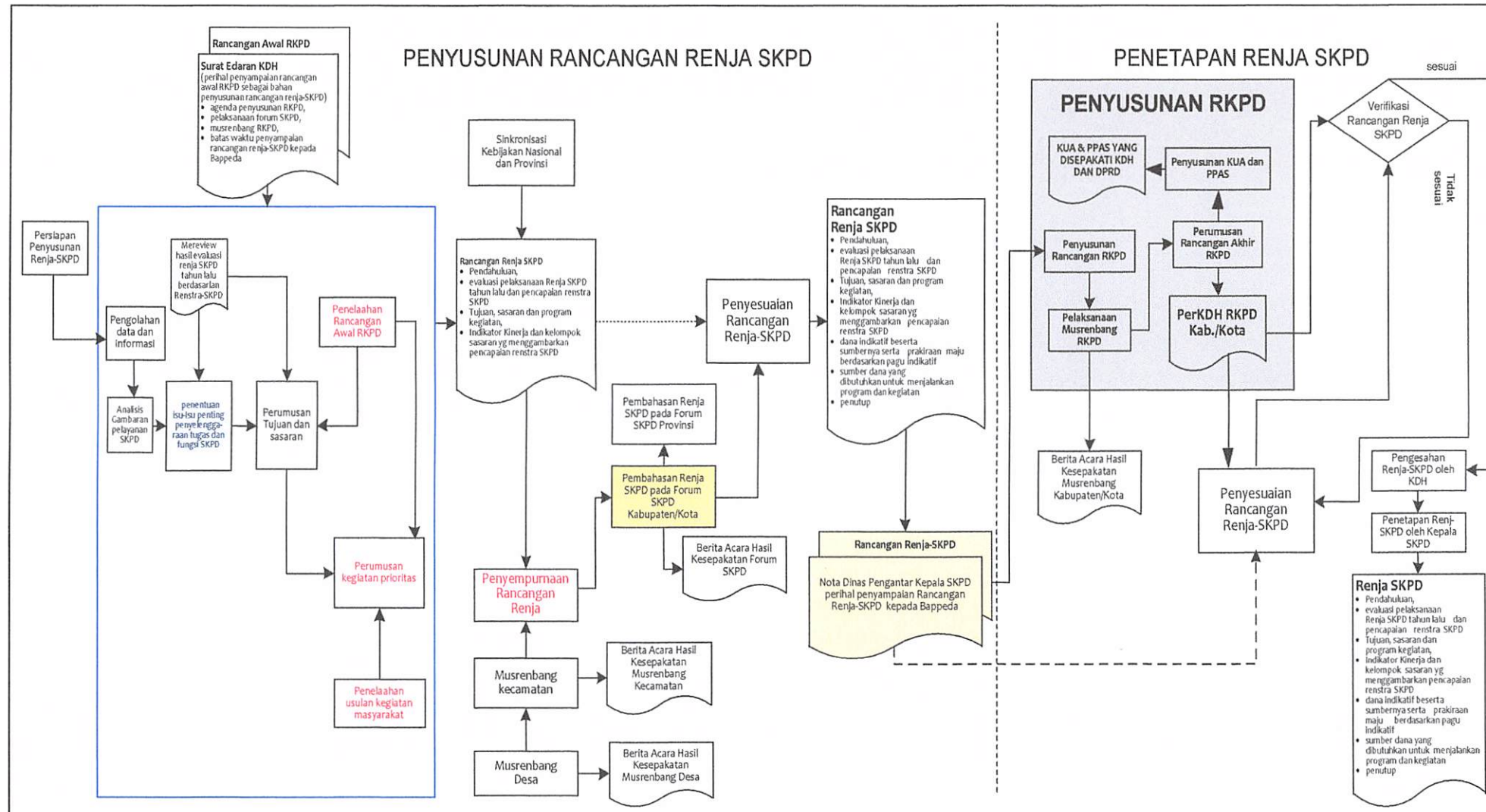
Secara rinci bagan alir tahapan penyusunan Renja PD sebagaimana digambarkan pada skema tahapan bagan alir penyusunan Renja PD pada Gambar 1.1.

Analisis kinerja pelayanan PD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan PD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Gambar 1.1  
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Renja PD Kabupaten Minahasa



Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan PD adalah:

1. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan PD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi;
2. Melakukan identifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut IKK atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
3. Melakukan identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra PD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
4. Melakukan perhitungan realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
5. Melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, berdasarkan kondisi target menurut Renstra PD dan capaian kinerja tahun 2020 dan perkiraan tahun berjalan, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan PD;
6. Memberikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta rumusan proyeksi untuk tahun rencana;
7. Bila dalam IKK angka standar atau target besarnya tidak tercantum, maka analisis capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra PD, juga dihubungkan dengan indikator yang terkait dengan target kinerja sesuai kebijakan nasional;
8. Bila dalam Renstra PD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan IKK atau target kinerja nasional, maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan (dihitung) mengacu pada indikator IKK atau target kinerja nasional.

## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa aturan yang mendasari dan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018



- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
  36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  43. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Diani, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan setiap tahun;
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan setiap tahun; dan
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditetapkan setiap tahun.
  47. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020 hal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  48. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  50. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
  53. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** penyusunan Perubahan Renja-PD Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah untuk serta memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran tahunan PD, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi pemerintah daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ke IV.

Sedangkan **Tujuan** penyusunan Perubahan Renja-PD adalah tersedianya bahan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 unsur pengawasan, dan sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Renja-PD Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun 2022 (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

## BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

## BAB IV. PENUTUP

Bagian ini berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra terhadap program-program Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program Penyelenggaraan Pengawasan  
Realisasi program dengan indikator kinerja :
  - Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, tingkat capaian 84,15;
  - Jumlah temuan BPK, tingkat capaian 14 temuan
  - Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)\*, tingkat capaian 17,6;
  - Persentase Pelanggaran Pegawai, tingkat capaian 0,07%
2. Realisasi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  
Realisasi program dengan indikator kinerja:
  - Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), tingkat capaian Level 2;
  - Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, tingkat capaian Level 3
3. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Realisasi program dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan penunjang unsur pengawasan, tingkat capaian 4.
  - Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan penunjang unsur pengawasan, tingkat capaian 4.

Tujuan Strategis Pelayanan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efisien, Efektif, dan Bersih dengan indikator dan target:

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Baik (BB)
3. Indeks Integritas Pelayanan Publik: > 80,00
4. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi): 6 Unit Kerja
5. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) : 6 Unit Kerja
6. Indeks MCP : 80%

Hasil evaluasi terhadap kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 menunjukkan pencapaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis

- Sasaran 1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan indikator dan target :
- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Target 82,73% Tingkat Capaian 84,15%
  - Jumlah Temuan BPK, Target 14 temuan Tingkat Capaian 18 Temuan
  - Persentase pelanggaran pegawai, Target 0,09 % Tingkat capaian 0,07%
  - Presentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B), Target 50 % Tingkat Capaian 17,6%

- Sasaran 2 Meningkatkan kebijakan pembinaan pengawasan, pendampingan dan asistensi, dengan indikator dan target:
- Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Target Level 2 Tingkat Capaian Level 2
  - Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, Target Level 2 Tingkat Capaian Level 3
- Sasaran 3 Meningkatkan kepuasan pihak terkait atas kualitas layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah unsur pengawasan, dengan indikator dan target:
- Indeks kepuasan masyarakat atas layanan penunjang unsur pengawasan, Target Level 4 Tingkat capaian Level 4

Secara ringkas hasil rekapitulasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (Renja) dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sampai dengan tahun berjalan diuraikan sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan  
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Minahasa

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
6	1	INSPEKTORAT DAERAH												
6	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	84,73	73,93	82,73	84,15	101,7	83,73	83,73	100		
				Jumlah Temuan BPK	100	38	14	18	77,8	13	13	100		
				Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*	100	20	50	17,6	35,2	75%	75%	100		
				Persentase pelanggaran pegawai*	0,07	0,10	0,09	0,07	0,77	0,08	0,08	100		
6	1	02	2.0	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	77	66,10	70	4	5,7	75	75	100
					Jumlah Temuan APIP	841	290	140	115	82,1	130	130	100	
6	1	02	2.0	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Perangkat Daerah	14	5	3	3	3	3		
					Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	166	67	58	58	33				
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	3	0	1	1	1	1			
					Jumlah Laporan Monev Pelayanan Publik	3	1	1	1	1	1			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan probity audit dan audit kepatuhan	20	2	1	1		6		
6	1 02 2.0 1 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Perangkat Daerah	345	116	114	114	100	100	100
		Jumlah LHP Keuangan Dana BOS	166	69	25	25		25		
		Jumlah LHP Keuangan Dana Kelurahan	18	0	6	6		6		
6	1 02 2.0 1 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD	12	4	2	2	100	2	2
		Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	516	116	114	114		114		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	6	2	1	1		1		
		Jumlah Laporan Reviu RPJMD Perubahan	2	0	1	1		1		
		Jumlah Laporan Reviu RPJPD Perubahan	0	0	-	0		-		
		Jumlah Laporan Reviu Renstra PD/Perubahan Renstra PD	1	0	1	1		1		
		Jumlah Laporan Reviu Renja PD/ Perubahan Renja PD	342	0	114	114		114		
		Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	6	0	2	2		2		
		Jumlah Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	16	0	4	4		4		
		Jumlah Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus	124	40	28	28		28		
		Jumlah Laporan Reviu LPPD	12	0	4	4		4		
6	1 02 2.0 1 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	5	2	1	1	100	1	1
6	1 02 2.0 1 05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa	130	66	44	44	100	10	10
		Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan BUM	20	0	-	-		10		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Desa												
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	132	0	-	-		66						
		Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	4	0	-	-		2						
		Jumlah Laporan Hasil Revisi Ranperdes APBDesa	454	0	-	-		-						
6	1	02	2.0	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang pelaksanaannya merupakan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya	3	0	1	1	100	1	100	
6	1	02	2.0	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	8	1	2	2	100	2	100	
						Jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	18	5	4	4		4		
6	1	02	2.0		<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Persentase rekomendasi kerugian negara/daerah atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti</i>	75	41,9	60	11,4	19	65	65	100
						Jumlah Temuan APIP berindikasi kerugian negara/daerah	115	31	30	26	87	29	29	100
6	1	02	2.0	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah	6	0	2	2		2		
6	1	02	2.0	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif	67	20	12	12		13		
6	1	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			
6	1	03	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	121	37	25	25	100	25	100
6	1	03	2.0	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rancangan Kebijakan Teknis yang disusun	114	36	23	23		23	
6	1	03	2.0	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rancangan Kebijakan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	9	2	2	2		2	
6	1	03	2.0	2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan yang operasional	15	4	2	2	100	3	100
						Jumlah asistensi yang dilaksanakan	27	6	3	3	100	6	100
6	1	03	2.0	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan maturitas SPIP	9	2	1	1		2	
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan kapabilitas APIP	9	2	1	1		2	
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	6	0	1	1		2	
6	1	03	2.0	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi	6	2	2	1		1	
						Jumlah laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi	6	2	2	1		1	
6	1	03	2.0	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	6	2	2	1		1	
						Jumlah Laporan Hasil Verifikasi LHKPN/LHKS	9	2	2	2	100	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)			
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
6	1	03	2.0	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Satgas UPP Saber Pungli yang terfasilitasi	6	2	2	1	100	1	100
						Jumlah laporan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)	3	0	0	1		1	
						Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System, dan Benturan Kepentingan	3	0	0	1		1	
						Jumlah laporan hasil penilaian mandiri Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	3	0	0	1		1	
6	1	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Penunjang Unsur Pengawasan	4	4	4	4	4	4	
6	1	01	2.0		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>AA (&gt; 90)</b>	<b>BB (76,34)</b>	<b>BB (76,34)</b>	<b>A (&gt; 80)</b>	<b>A (&gt; 80)</b>	<b>A (&gt; 80)</b>	<b>A (&gt; 80)</b>
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku (disahkan)	62	21	11	11	100	10	100
6	1	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan tersusun	20	6	4	4		3	
6	1	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Tersusun	6	2	1	1		1	
6	1	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan Tersusun	6	2	1	1		1	
6	1	01	2.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Tersusun	6	2	1	1		1	
6	1	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Tersusun	6	2	1	1		1	
6	1	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan	6	2	1	1		1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusun							
6	1 01 2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun	15	2	4	4	4		
6	1 01 2.0 2	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6	1 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPM Gaji dan Tunjangan yang diterbitkan	168	56	28	28	28		
			Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan TPP Sesuai Peraturan Perundangan	274	91	46	46	46		
6	1 01 2.0 2 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPPD yang diterbitkan	1274	431	190	190	200		
6	1 01 2.0 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	6	2	1	1	1		
6	1 01 2.0 2 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	4	2	2	2		
6	1 01 2.0 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	6	2	1	1	1		
6	1 01 2.0 2 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen/bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	6	2	1	1	1		
6	1 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	102	34	17	17	17		
6	1 01 2.0 2 08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi	Jumlah laporan analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12	4	2	2	2		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Anggaran												
6	1	01	2.0 3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung administrasi yang baik</b>	90	90	90	98	109	90	90	100
6	1	01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	2	1	1	1		
6	1	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	2	1	1	1		
6	1	01	2.0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	0	1	1	1		
6	1	01	2.0 3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6	2	1	1	1		
6	1	01	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	2	1	1	1		
6	1	01	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	2	1	1	1		
6	1	01	2.0 3	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6	2	1	1	1		
6	1	01	2.0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
6	1	01	2.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi tersedia (unit)	1	1	1	1	1		
6	1	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya tersedia (stel)	183	-	0	0	46		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu tersedia (stel)	319	45			92		
6	1 01 2.0 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	426	90	97	97	97		
6	1 01 2.0 5 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	7	1	2	2	2		
6	1 01 2.0 5 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1756	91	540	91	540		
6	1 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pejabat mengikuti diklat fungsional pengawasan (P2UPD dan Auditor) dan diklat struktural	56	8	12	9	12		
6	1 01 2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	185	35	40	40	40		
6	1 01 2.0 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	75	22	15	15	15		
6	1 01 2.0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan layanan administrasi administrasi umum yang didukung administrasi yang baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6	1 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	0	0	0	0		
6	1 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor:							
			a. Map (Buah)	2764	760	668	668	668		
			b. Odner Buah	214	4	70	70	70		
			c. Ballpoint (Buah)	165	57	36	36	36		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		d. Isi Stepler (Dos)	10	1	3	3		3		
		e. Binder Clips (Dos)	333	243	30	30		30		
		f. Kertas HVS F4 (Rim)	315	135	60	60		60		
		g. Kertas HVS A4 (Rim)	177	0	59	59		59		
		h. Tinta Warna (Botol)	52	16	12	12		12		
		i. Tinta Hitam (Botol)	112	37	25	25		25		
		j. Tinta/Toner Printer (Buah)	21	12	3	3		3		
		k. Buku Tulis (Buah)	20	0	0	0		10		
		l. Amplop Coklat Folio (Pak)	10	0	0	0		5		
		m. Paper Clip (Dos)	42	30	0	0		6		
		n. Kertas Cover (Rim)	5	1	0	0		2		
		o. Lakban	10	0	0	0		5		
		p. Cutter						0		
6	1	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia:		100		100
			6							
					a. Sapu Lantai (Buah)	4	0	0	0	4
					b. Keset Kaki (Buah)	4	0	0	0	4
					c. Keranjang Sampah (Buah)	10	0	0	0	10
					d. Ember (Buah)	5	0	0	0	5
					f. Gayung (Buah)	5	0	0	0	5
					g. Skep Sampah (Buah)	2	0	0	0	2
					h. Piring (Lusin)	5	0	0	0	0
					i. Mangkok (Lusin)	5	0	0	0	0
					j. Kemoceng (Lusin)	5	0	0	0	0
					k. Sendok/Garpu (Lusin)	10	0	0	0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)				
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
6	1	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Tersedia								
						a. Aqua Galon 19 Liter	240	0	0	0		120		
						b. Kopi Sachet	240	0	0	0		120		
						c. Gula (kg)	48	0	0	0		24		
						d. Minuman Kemasan (Lusin/Dos)	48	0	0	0		24		
						e. Kopi Bubuk (kg)	24	0	0	0		12		
6	1	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan								100
						a. Cetak Ballho (meter)	300	0	100	0		100		
						b. Peggandaan Dokumen (lembar)	55350	0	17450	0		18450		
6	1	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Tersedia selama 12 bulan	4 Penerbit		4 Penerbit	4 Penerbit		4 Penerbit		
6	1	01	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Tersedia								
						a. Styrofoam	0	0	0	0		0		
						b. Cat	0	0	0	0		0		
						c. Papan	0	0	0	0		0		
						d. Balok	0	0	0	0		0		
6	1	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitas Layanan Tersedia								
						a. Jumlah Paket Makanan Tersedia (Dos)	480	0	222	39		160		
						b. Jumlah Paket Snack Tersedia (Dos)	480	0	230	0		160		
						c. Jumlah air kemasan tersedia (Galon)	120	0	249	63		0		
6	1	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	30	14	4	4		6		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	28	12	2	2		4		
6	1 01 2.0 6	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	0	0	1		
6	1 01 2.0 6	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Prasarana Pendukung Implementasi SPBE Tersedia		0	0	0	0		
		a. Aplkasi SPBE Tersedia	1 Apl	0	0	0		1 Apl		
		b.								
6	1 01 2.0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
6	1 01 2.0 7	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia							
		a. Kendaraan Roda 4 (Unit)	1	0	0	0		0		
		b. Kendaraan Roda 2 (Unit)	8	0	0	0		1		
6	1 01 2.0 7	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedia							
6	1 01 2.0 7	06 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Tersedia:							
		a. Almari Arsip (Buah)	10	1	2	2		0		
		b. Meja Kerja Pejabat (Buah)	6	0	0	0		0		
		c. Kursi Kerja Pejabat (Buah)	30	0	0	0		0		
		d. Meja 1 Biro Tersedia (Buah)	3	0	0	0		1		
		e. Meja 1/2 Biro Tersedia (Buah)	18	0	0	0		3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		f. Kursi Rapat (Buah)	47	0	0	0		4		
		g. Meja Rapat (Buah)	6	0	0	0		0		
		h. Meja dan Kursi Tamu/Sofa (Set)	2	1	0	0		0		
6	1	01	2.0	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedia		100		100
					a. Personal Computer (Unit)	15	3	2	2	1
					b. Lap Top (Unit)	15	3	1	1	1
					c. LCD Proyektor/Infokus (Unit)	3	1	0	0	0
					d. Lemari Es (Unit)	2	1	0	0	0
					e. Printer (Unit)	12	2	0	0	0
					f. Scanner (Unit)	1	0	0	0	0
					g. Mesin Photo Copy (Unit)	1	0	0	0	0
					h. Kamera (Unit)	2	0	0	0	0
					i. Televisi (Unit)	2	0	0	0	0
					j. Brandkas (Unit)	2	0	0	0	0
					k. Mikrotik (Unit)	1	0	0	0	0
6	1	01	2.0	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Tersedia				
					a.					
					b.					
6	1	01	2.0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia (Unit)				100
6	1	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia				
					a. Gorden (meter)	100	0	0	0	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		b. Tabung Pemadam Kebakaran (buah)	2	0	0	0		1		
		c. Air Conditioner (unit)	3	2	0	0		0		
6	1	01	2.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia				
					a. Lampu hias					
					b.					
6	1	01	2.0		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan</i>	100	100	100	100
6	1	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat melalui jasa pengiriman (berkas)	15	0	5	0
						Jumlah Materai Tersedia (buah)	1080	450	180	180
6	1	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0			
					a. Jasa Internet Up to 50 Mbps Per Bulan (Bulan)		36	24	12	12
					b. Jasa Layanan Air Bersih (m3)		0	0	0	0
					b. Jasa Layanan Air Listrik (Kwh/Tahun)		5100	3900	5100	5100
6	1	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor yang tersedia	2	4	3	3
6	1	01	2.0	9	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>		90	90	90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							
					a. Kendaraan Roda 4 (Unit)	1	1	1	1	1	1		
					b. Kendaraan Roda 2 (Unit)	8	5	5	5	5	7		
6	1	01	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Almari Mendapatkan Pemeliharaan							
					Jumlah Meja Biro Mendapatkan Pemeliharaan								
					Jumlah Meja 1/2 Biro Mendapatkan Pemeliharaan								
					Jumlah Kursi Kerja Mendapatkan Pemeliharaan								
6	1	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Mendapatkan Pemeliharaan							
					a. Personal Computer/Lap Top (Unit)	30	0	10	10	10	10		
					b. Printer (Unit)	6	0	2	2	2	2		
6	1	01	2.0 9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan							
					a.								
					b.								
6	1	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan (m2)	180	80	0	0	0	50	
6	1	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan							
					a. Gorden								
					b. Tabung Pemadam Kebakaran								
6	1	01	2.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		9 dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan							
			a. Lampu hias							
			b.							

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, Inspektorat Daerah merupakan Satuan Kerja penunjang pemerintah daerah yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas pokok**, membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan **Fungsi** :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan;
4. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, RPJMN Tahun 2020-2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa 1) Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang masih rendah, 2) Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang masih rendah Masih 3) Terdapat rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum ditindaklanjuti, 4) Masih adanya pelanggaran pegawai, 5) Masih banyaknya jumlah temuan BPK, dan 6) Belum adanya unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 7) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (rincian sebagaimana table 2.2.)

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Daerah  
Kabupaten Kabupaten Minahasa Tahun 2021

NO	Indikator Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	-	✓ Permendagri 18 Tahun 2020	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	
2.	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	✓ Permendagri 18 Tahun 2020	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	-	✓ Permendagri 86 Tahun 2017	73,93	82,73	83,73	84,73	81,14	84,15	83,14	84,14	
4.	Persentase Pelanggaran Pegawai	-	✓ Permendagri 86 Tahun 2017	0,10	0,09	0,08	0,07	0,09	0,07	0,07	0,06	
5.	Jumlah Temuan BPK	-	✓ Permendagri 86 Tahun 2017	18	14	13	12	13	18	11	10	
6.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat SAKIP Minimal Baik (B)	-	-	-	40	60	90	6	17,6			
7.	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa secara umum adalah sebagaimana sudah diuraikan di atas.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan secara lebih detail sebagaimana diuraikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2021)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Gambaran Pelayanan SKPD					
1. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 1	IKK (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat fungsional auditor belum tersedia</li> <li>- Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.</li> <li>- Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal</li> <li>- Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal</li> <li>- Standar Operasional dan Prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pembentukan jabatan fungsional auditor dan fungsional lainnya oleh lembaga terkait terbatas</li> <li>- Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar.</li> <li>- Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan oleh BPKP terbatas.</li> </ul>	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan menjadi level 3

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2021)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>pengawasan belum disiapkan secara maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan</li> <li>- Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan pembentukan pejabat fungsional masih terbatas.</li> </ul>		
2. Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	IKK (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat fungsional auditor belum tersedia</li> <li>- Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.</li> <li>- Implementasi pengawasan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.</li> <li>- Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.</li> </ul>	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu ditingkatkan menjadi level 3

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2021)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal</li> <li>- Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal</li> <li>- Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan</li> <li>- Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas.</li> <li>- NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.</li> </ul>		
3. Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK	84,15	IKU Urusan Pengawasan (Permendagri 86	- Fungsi <i>consulting (assurance dan advisory)</i> terkait dengan peran	- Objek pemeriksaan telah optimal dalam menindaklanjuti	Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK perlu ditingkatkan lagi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2021)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tahun 2017)	APIP telah berjalan baik	rekomendasi temuan BPK secara tepat/sesuai	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya</li> <li>- Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah telah berfungsi optimal</li> </ul>	
4. Jumlah Temuan BPK	18	IKU Urusan Pengawasan (Permendagri 86 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi <i>consulting (assurance dan advisory)</i> terkait dengan peran APIP belum berjalan baik, utamanya dalam hal fasilitasi objek pemeriksaan untuk mengelola kegiatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya</li> <li>- Objek pemeriksaan belum maksimal dalam mengelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum menyiapkan dan atau mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal dengan baik</li> <li>- Perangkat daerah/ objek pemeriksaan lainnya belum mengimplementasikan</li> </ul>	Jumlah Temuan BPK perlu diturunkan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2021)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				hasil-hasil temuan BPK/APIP dalam pengelolaan kegiatannya	
5. Persentase Pelanggaran Pegawai	0,06	IKU Urusan Pengawasan (Permendagri 86 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditor/analisis kepegawaian belum tersedia</li> <li>- Kegiatan khusus pengawasan kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal</li> </ul>	-	Persentase Pelanggaran Pegawai perlu diturunkan
6. Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan	4	IKM	- Indikator baru dimasukkan sebagai kinerja program	- Adanya perubahan nomenklatur program	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan perlu ditingkatkan
7. Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat SAKIP Sangat Baik (BB)	17,6	-	- Masih terbatasnya pembinaan dan pendampingan SAKIP	Masih tidak selarasnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan SAKIP dari perangkat daerah. Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat SAKIP Sangat Baik (BB) perlu ditingkatkan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD maka permasalahan-permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

#### Permasalahan Berdasarkan Kajian Pelayanan PD

1. Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Di pihak lain sangat diharapkan dengan adanya pelayanan pengawasan maka persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan mengalami peningkatan setiap tahun.  
Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:  
Internal
  - a) Fungsi *consulting (assurance dan advisory)* terkait dengan peran APIP belum berjalan baik, utamanya dalam hal fasilitasi objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi.Eksternal
  - a) Objek pemeriksaan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK secara tepat/sesuai.
  - b) Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya.
  - c) Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum berfungsi optimal
2. Jumlah Temuan BPK dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif jumlahnya. Di pihak lain sangat diharapkan dengan adanya pelayanan pengawasan maka Jumlah Temuan BPK akan mengalami penurunan setiap tahun.  
Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:  
a) Fungsi *consulting (assurance dan advisory)* terkait dengan peran APIP belum berjalan baik, utamanya dalam hal fasilitasi objek pemeriksaan untuk mengelola kegiatan.  
Eksternal
  - a) Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya.
  - b) Objek pemeriksaan belum maksimal dalam mengelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum menyiapkan dan atau mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal dengan baik.
  - c) Perangkat daerah/objek pemeriksaan lainnya belum mengimplementasikan hasil-hasil temuan BPK/APIP dalam pengelolaan kegiatannya.
3. Persentase pelanggaran pegawai, yang diukur dari jumlah pegawai yang dikenai hukuman disiplin cenderung fluktuatif. Di pihak lain sangat diharapkan dengan adanya pelayanan pengawasan maka persentase pelanggaran pegawai akan mengalami penurunan setiap tahun.  
Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:
  - a) Auditor/analisis kepegawaian belum tersedia
  - b) Kegiatan khusus pengawasan kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal
4. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih rendah (33%) dan belum mencapai target nasional level 3  
Internal

- a) Pejabat fungsional auditor belum tersedia
- b) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal
- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas.

Eksternal

- a) Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar.
  - b) Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan oleh BPKP terbatas.
5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP mencapai level 2, belum mencapai target nasional level 3 (66.7%)

Internal

- a) Pejabat fungsional auditor belum tersedia
- b) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal
- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas.
- g) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.

Eksternal

- a) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.
  - b) Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.
6. Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan, belum dilakukan survey kepuasan masyarakat

Internal

- a) Indikator baru dimasukkan sebagai kinerja program



Eksternal

a) Adanya perubahan nomenklatur program

7. Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat SAKIP Sangat Baik (BB) masih sangat rendah (17,6%)

Internal

a) Masih terbatasnya pembinaan dan pendampingan SAKIP.

Eksternal

a) Masih tidak selarasnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan SAKIP dari perangkat daerah

b) Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

## 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting		
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
6	1				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							
6	1	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat		4 (Sangat Puas)			4 (Sangat Puas)	
6	1	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku (disahkan)</i>		10 Dok			10 Dok	
6	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan tersusun		3 Dok	4,741,446	APBD/DAU	3 Dok	232.410
6	1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Tersusun		1 Dok			1 Dok	
6	1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan Tersusun		1 Dok			1 Dok	
6	1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Tersusun		1 Dok			1 Dok	
6	1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Tersusun		1 Dok			1 Dok	
6	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusun		1 Dok	485,936		1 Dok	485,900
6	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun		2 Dok			2 Dok	
6	1	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik</b>		100			100	
6	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan TPP Sesuai Peraturan Perundangan		46 ASN	9,303,435,050	APBD/DAU	46 ASN	8,347.853.705

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)				
6	1	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPPD yang diterbitkan		150 SPPD	983,394	APBD/DAU	200 SPPD	983,319	
6	1	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun		1 Dok			1 Dok		
6	1	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD		2 Lap	450,000	APBD/DAU	2 Lap	450,000	
6	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		1 Lap	463,822	APBD/DAU	1 Lap	450,000	
6	1	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen/bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun		1 Dok			1 Dok		
6	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun		17 Lap	476,624	APBD/DAU	17 Lap	900,000	
6	1	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		2 Lap	476,624	APBD/DAU	2 Lap	600,000	
6	1	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung administrasi yang baik</b>		<b>90</b>			<b>90</b>		
6	1	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Lap			1 Lap		
6	1	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Lap			1 Lap		
6	1	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Lap			1 Lap		
6	1	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap			1 Lap		
6	1	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap			1 Lap		

					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting		
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
6	1	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap			1 Lap		
6	1	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Lap			1 Lap		
6	1	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik</b>		<b>100</b>			<b>100</b>		
6	1	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin tersedia							
6	1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya tersedia		46 Stel		APBD/DAU	46 Stel		
						Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu tersedia		92 Stel			92 Stel		
6	1	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		97 Lap			97 Lap		
6	1	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 Lap			2 Lap		
6	1	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai		540 Lap			540 Lap		
6	1	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pejabat mengikuti diklat fungsional pengawasan (P2UPD dan Auditor) dan diklat struktural		12 ASN	141,686,000	APBD/DAU	12 ASN	83.409.000	
						Jumlah ASN Mengikuti PKS (in house training)		45 ASN			40 ASN		
6	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		15 ASN			15 ASN		
6	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan		15 ASN	1,700,000	APBD/DAU	15 ASN		
6	1	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Persentase pengelolaan layanan</b>		<b>100</b>			<b>100</b>		

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
					<b>Daerah</b>	<b>administrasi administrasi umum yang didukung administrasi yang baik</b>							
6	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia							
6	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia			19,931,990	APBD/DAU		20,516,232	
						a. Map		668 Buah			668 Buah		
						b. Odner		70 Buah			70 Buah		
						c. Ballpoint		36 Buah			36 Buah		
						d. Isi Stepler		3 Dos			3 Dos		
						e. Binder Clips		30 Dos			30 Dos		
						f. Kertas HVS F4		60 Rim			60 Rim		
						g. Kertas HVS A4		59 Rim			59 Rim		
						h. Tinta Warna		12 Botol			12 Botol		
						i. Tinta Hitam		25 Botol			25 Botol		
						j. Tinta/Toner Printer		3 Buah			3 Buah		
						k. Buku Tulis		10 Buah			10 Buah		
						l. Amplop Coklat Follo		5 Pak			5 Pak		
6	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia				APBD/DAU			
						a. Sapu Lantai		4 Buah			4 Buah		
						b. Kaset Kaki		4 Buah			4 Buah		
						c. Keranjang Sampah		10 Buah			10 Buah		
						d. Ember		5 Buah			5 Buah		
						f. Gayung		5 Buah			5 Buah		
						g. Skep Sampah		2 Buah			2 Buah		
						h. Piring							
						i. Mangkok							

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
						j. Kemoceng							
						k. Sendok/Garpu							
6	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Tersedia			6,792,200	APBD/DAU		7,241,080	
						a. Aqua Galon 19 Liter		120 Galon			120 Galon		
						b. Kopl Sachet		120 Pak			120 Pak		
						c. Gula		24 Kg			24 Kg		
						d. Minuman Kemasan		24 Dos			24 Dos		
						e. Kopl Bubuk		12 Kg			12 Kg		
6	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			10,496,750	APBD/DAU		10,468,115	
						a. Cetak Ballho		100 meter			100 meter		
						b. Penggandaan Dokumen		18.450 Lbr			18.450 Lbr		
6	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Tersedia selama 12 bulan		4 Penerbit	4,800,000	APBD/DAU	4 Penerbit	4,800,000	
6	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitas Layanan Tamu Tersedia			14,080,000	APBD/DAU		14,520,000	
						a. Jumlah Paket Makanan Tersedia		160 Dos			160 Dos		
						b. Jumlah Paket Snack Tersedia		160 Dos			160 Dos		
						c. Jumlah air kemasan tersedia (Galon)							
6	1	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		6	84,290,000	APBD/DAU	6	99.738.000	
						Jumlah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		4			4		
6	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Lap			1 Lap		
6	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Prasarana Pendukung Implementasi SPBE Tersedia		1 Apl			1 Apl		

				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting		
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
6	1	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)</b>		<b>80</b>			<b>80</b>		
6	1	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia				<b>APBD/DAU</b>			
					a. Kendaraan Roda 4		0			0		
					b. Kendaraan Roda 2		1			1		
6	1	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Tersedia			9,415,800	<b>APBD/DAU</b>		11,698,830	
					a. Jumlah Almari Tersedia							
					b. Jumlah Meja 1 Biro Tersedia		1 buah			1 buah		
					c. Jumlah Meja 1/2 Biro Tersedia		3 buah			3 buah		
					d. Jumlah Kursi Kerja Tersedia		4 buah			4 buah		
6	1	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedia			34,000,000	<b>APBD/DAU</b>		64.380,000	
					a. Personal Computer		1 Unit			1 Unit		
					b. Lap Top		1 Unit			1 Unit		
6	1	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia				<b>APBD/DAU</b>			
					a. Gorden		100 meter			100 meter		
					b. Tabung Pemadam Kebakaran		1 Buah			1 Buah		
6	1	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan</b>		<b>100</b>			<b>100</b>		
6	1	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Tersedia		200 Buah	2,250,000	<b>APBD/DAU</b>	200 Buah	3.000,000	
					Jumlah surat menyurat melalui jasa pengiriman		5 Berkas			5 Berkas		
6	1	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya			14,749,500	<b>APBD/DAU</b>		15.550,000	

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
					Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik							
						a. Jasa Internet Up to 50 Mbps Per Bulan		12			12		
						b. Jasa Layanan Air Bersih		0			0		
						b. Jasa Layanan Air Listrik		5100 Kwh			5100 Kwh		
6	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor yang tersedia		3 THL	103,200,000	APBD/DAU	3 THL	103,200,000	
6	1	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>		90			90		
6	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			57,030,000	APBD/DAU		60,740,000	
						a. Kendaraan Roda 4		1 Unit			1 Unit		
						b. Kendaraan Roda 2		7 Unit			7 Unit		
6	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Mendapatkan Pemeliharaan			8,680,000	APBD/DAU		8,680,000	
						a. Personal Computer/Lap Top		10 Unit			10 Unit		
						b. Printer		2 Unit			2 Unit		
6	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan		50 m2		APBD/DAU	50 m2		
6	1	01			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</b>		<b>83.73</b>			<b>83.73</b>		
						<b>Jumlah Temuan BPK</b>		<b>13</b>			<b>13</b>		
						<b>Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik</b>		<b>50</b>			<b>50</b>		



					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
						<b>(B)*</b>							
						Persentase pelanggaran pegawai		0.08			0.08		
6	1	02	2.01		<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti</i>		75			75		
						<i>Jumlah Temuan APIP</i>		130			130		
6	1	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Perangkat Daerah		3	128,275,000	APBD/DAU	3	152,750,000	
						Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		58			58		
						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		1			1		
						Jumlah Laporan Monev Pelayanan Publik		1			1		
						Jumlah laporan probity audit dan audit kepatuhan		6			6		
6	1	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Perangkat Daerah		57	466,725,000	APBD/DAU/DBH	57	437.025,000	
						Jumlah LHP Keuangan Dana BOS		25			25		
6	1	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD		2	122,550,000	APBD/DAU	2	137.025,000	
						Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah		114			114		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		1			1		
						Jumlah Laporan Reviu RPJMD Perubahan		0			0		
						Jumlah Laporan Reviu RPJPD Perubahan		0			0		
						Jumlah Laporan Reviu Renstra		0			0		

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
						PD/Perubahan Renstra PD							
						Jumlah Laporan Reviu Renja PD/Perubahan Renja PD		114			114		
						Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran		2			2		
						Jumlah Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa		2			2		
						Jumlah Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus		28			28		
						Jumlah Laporan Reviu LPPD		1			1		
6	1	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		1	17,250,000	APBD/DAU	1	19,125,000	
6	1	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengelolaan Keuangan Dana Desa		10	242,550,000	APBD/DAU	10	212.250,000	
						Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan BUM Desa		10			10		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa		22			22		
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa		2			2		
6	1	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)		2	44,492,000	APBD/DAU	2	45,692,000	
						Jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP		4			4		
6	1	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Persentase rekomendasi kerugian negara/daerah atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti</i>		65			65		
						<i>Jumlah Temuan APIP berindikasi kerugian negara/daerah</i>		29			29		

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
6	1	02	2.01	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah		2	24,000,000	APBD/DAU	2	6.570.,800	
6	1	02	2.01	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif		13	70,200,000	APBD/DAU	13	70,200,000	
6	1	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		Level 3			Level 3		
						Tingkat Kematangan Implementasi SPIP		Level 3			Level 3		
6	1	03	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan</i>		25			25		
6	1	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rancangan Kebijakan Teknis yang disusun		25			25		
6	1	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rancangan Kebijakan Fasilitasi Pengawasan yang disusun		7			7		
6	1	03	2.02		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah pendampingan yang operasional</i>		6			6		
						Jumlah asistensi yang dilaksanakan		4			4		
6	1	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan maturitas SPIP		2	6,512,000		2	6,512,000	
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan kapabilitas APIP		2			2		
6	1	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,	Jumlah laporan hasil Pendampingan,		1	9,450,000	APBD/DAU	1	9,750,000	

					Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting			
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
					dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Asistensi, Verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi							
						Jumlah laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi		1			1		
6	1	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi		1	9,450,000	APBD/DAU	1	8,400,000	
						Jumlah Laporan Hasil Verifikasi LHKPN/LHKSN		2			2		
6	1	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah satgas UPP Saber Pungli yang terfasilitasi		1	150,320,000	APBD/DAU/DBH	1	53,550,000	
						Jumlah laporan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)		1			1		
						Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System, dan Benturan Kepentingan		1			1		
						Jumlah laporan hasil penilaian mandiri Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		1			1		

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dasar pertimbangan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2022 adalah Tusi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, RPJMD Kab. Minahasa Tahun 2018-2023 dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023.

- Jumlah program dan jumlah kegiatan, adalah 3 (tiga) program, dan 12 (Dua Belas) kegiatan, dan 68 (Enam puluh delapan) sub kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar di seluruh wilayah kabupaten Minahasa

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp10.018.746.391

Rumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023, diuraikan sebagaimana tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Minahasa**

Nama PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6	1	02								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK		83,73	1.080.637.800		84,73	1.340.695.571
				Jumlah Temuan BPK		13			12	
				Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*		75			100	
				Persentase pelanggaran pegawai*		0,08			0,07	
6	1	02	2.01							
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	75	1.003.867.000		77	1.228.253.571
					Jumlah Temuan APIP	130			125	
6	1	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Perangkat Daerah	3	152.750.000	3	185.412.938
						Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	33		33	
						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	1		1	
						Jumlah Laporan Monev Pelayanan Publik	1		1	
						Jumlah laporan probity audit dan audit kepatuhan	6		6	
6	1	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Perangkat Daerah	57	437.025.000	57	514.564.313
						Jumlah LHP Keuangan Dana BOS	25		25	
						Jumlah LHP Keuangan Dana Kelurahan	6		6	
6	1	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD	2	137.025.000	2	160.083.000
						Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	114		114	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		1				1	
		Jumlah Laporan Reviu RPJMD Perubahan		0				0	
		Jumlah Laporan Reviu RPJPD Perubahan		0				0	
		Jumlah Laporan Reviu Renstra PD/Perubahan Renstra PD		0				0	
		Jumlah Laporan Reviu Renja PD/ Perubahan Renja PD		114				114	
		Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran		2				2	
		Jumlah Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa		4				4	
		Jumlah Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus		28				28	
		Jumlah Laporan Reviu LPPD		4				4	
6	1 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1	19.125.000			1	20.872.500
6	1 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa	10	212.250.000			10	293.485.500
			Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan BUM Desa	10				10	
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	66				66	
			Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	2				2	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Ranperdes APBDesa	227				227	
6	1 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang pelaksanaannya merupakan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya	1				1	
6	1 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	2	45.692.000			2	53.835.320
			Jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	4				4	
6	1 02 2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi kerugian negara/daerah atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	65	76.770.800			75	112.442.000
			Jumlah Temuan APIP berindikasi kerugian negara/daerah	29				25	
6	1 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah	2	6.570.800			2	27.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
6	1	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif	13	70.200.000		14	84.942.000
						Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	4			4	
						Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3			Level 3	
						Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3			Level 3	
6	1	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	78.212.000		Level 3	444.220.233
						Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3			Level 3	
6	1	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	25	0		25	0
6	1	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rancangan Kebijakan Teknis yang disusun	23			23	
6	1	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rancangan Kebijakan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2			2	
6	1	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan yang operasional	3	78.212.000		3	388.532.733
						Jumlah asistensi yang dilaksanakan	6			7	
6	1	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan maturitas SPIP	2	6.512.000		2	63.567.020
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan kapabilitas APIP	2			2	
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	2			3	
6	1	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi	1	9.750.000		1	11.434.500
						Jumlah laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi	1			1	
6	1	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	1	8.400.000		1	11.434.500
						Jumlah Laporan Hasil Verifikasi LHKPN/LHKSN	2			2	
6	1	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Satgas UPP Saber Pungli yang terfasilitasi	1	53.550.000		1	357.784.213
						Jumlah laporan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)	1			1	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System, dan Benturan Kepentingan		1				1	
		Jumlah laporan hasil penilaian mandiri Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		1				1	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Penunang Unsur Pengawasan		4				4	
6	1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		4	8.859.896.591			4	10.400.955.129
6	1 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		A (> 80)	718.310			AA (> 90)	7.742.496
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku (disahkan)		10				10	
6	1 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	232.410			3	6.943.793
6	1 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1				1	
6	1 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1				1	
6	1 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1				1	
6	1 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1				1	
6	1 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	485.900			1	798.703
6	1 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4				4	
6	1 01 2.02	Administrasi Keuangan		100	8.531.237.024			100	9.539.478.563
6	1 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28	8.347.853.705			28	9.536.020.926
		Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan TPP Sesuai Peraturan Perundangan		46				46	
6	1 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		200	983.319			208	1.084.192
6	1 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1				1	
6	1 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2	450.000			2	811.125
6	1 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		1	450.000			1	511.364

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Akhir Tahun SKPD							
6	1 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen/bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	1				1	
6	1 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	17	900.000			17	525.478
6	1 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2	600.000			2	525.478
6	1 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung administrasi yang baik	90				90	
6	1 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1				1	
6	1 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1				1	
6	1 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1				1	
6	1 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1				1	
6	1 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1				1	
6	1 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1				1	
6	1 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1				1	
6	1 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	100	83.409.000			100	293.115.760
6	1 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi tersedia (unit)	1				1	
6	1 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya tersedia (stel)	46				46	36.800.000
			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu tersedia (stel)	92					
6	1 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	97				97	
6	1 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2				2	
6	1 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	540				540	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	1 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		12	83.409.000			12	254.615.760
6	1 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		40				40	
6	1 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15				15	1.700.000
6	1 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	157.283.427			100	155.929.286
6	1 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0				0	
6	1 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.516.232				21.975.019
		a. Map (Buah)		668				668	
		b. Odner Buah		70				70	
		c. Ballpoint (Buah)		36				36	
		d. Isi Stepler (Dos)		3				3	
		e. Binder Clips (Dos)		30				30	
		f. Kertas HVS F4 (Rim)		60				60	
		g. Kertas HVS A4 (Rim)		59				59	
		h. Tinta Warna (Botol)		12				12	
		i. Tinta Hitam (Botol)		25				25	
		j. Tinta/Toner Printer (Buah)		3				3	
		k. Buku Tulis (Buah)		10				10	
		l. Amplop Coklat Follo (Pak)		5				5	
		m. Paper Clip (Dos)		6				6	
		n. Kertas Cover (Rim)		2				2	
		o. Lakban		5				5	
		p. Cutter		2				2	
6	1 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							2.000.000
		a. Sapu Lantai (Buah)		4					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Keset Kaki (Buah)		4					
		c. Keranjang Sampah (Buah)		10					
		d. Ember (Buah)		5					
		f. Gayung (Buah)		5					
		g. Skep Sampah (Buah)		2					
		h. Piring (Lusin)						5	
		i. Mangkok (Lusin)						5	
		j. Kemoceng (Lusin)						5	
		k. Sendok/Garpu (Lusin)						10	
6	1 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Tersedia		7.241.080				7.131.600
		a. Aqua Galon 19 Liter		120				120	
		b. Kopi Sachet		120				120	
		c. Gula (kg)		24				24	
		d. Minuman Kemasan (Lusin/Dos)		24				24	
		e. Kopi Bubuk (kg)		12				12	
6	1 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		10.468.115				11.572.667
		a. Cetak Baliho (meter)		100				100	
		b. Penggandaan Dokumen (lembar)		18450				19450	
6	1 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Tersedia selama 12 bulan	4 Penerbit	4.800.000			4 Penerbit	4.800.000
6	1 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Tersedia						
		a. Styrofoam							
		b. Cat							
		c. Papan							
		d. Balok							
6	1 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitas Layanan Tersedia		14.520.000				14.784.000
		a. Jumlah Paket Makanan Tersedia (Dos)		160				160	
		b. Jumlah Paket Snack Tersedia (Dos)		160				160	
		c. Jumlah air kemasan tersedia (Galon)							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
6	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		6	99.738.000		6	93.666.000
						Jumlah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		4			10	
6	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1			1	
6	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Prasarana Pendukung Implementasi SPBE Tersedia						
						a. Aplikasi SPBE Tersedia		2			2	
						b.						
6	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan prasarana sarana operatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)		80	76.078.830		90	72.900.000
6	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia						30.000.000
						a. Kendaraan Roda 4 (Unit)						
						b. Kendaraan Roda 2 (Unit)		0			1	
6	1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedia						
6	1	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Tersedia:			11.696.830			5.700.000
						a. Almari Arsip (Buah)						
						b. Meja Kerja Pejabat (Buah)						
						c. Kursi Kerja Pejabat (Buah)						
						d. Meja 1 Biro Tersedia (Buah)		1				
						e. Meja 1/2 Biro Tersedia (Buah)		3			3	
						f. Kursi Rapat (Buah)		4			3	
						g. Meja Rapat (Buah)						
						h. Meja dan Kursi Tamu/Sofa (Set)						
6	1	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedia			64.380.000			35.700.000
						a. Personal Computer (Unit)		1			1	
						b. Lap Top (Unit)		1			1	
						c. LCD Proyektor/Infokus (Unit)						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		d. Lemari Es (Unit)							
		e. Printer (Unit)							
		f. Scanner (Unit)							
		g. Mesin Photo Copy (Unit)							
		h. Kamera (Unit)							
		i. Televisi (Unit)							
		j. Brandkas (Unit)							
		k. Mikrotik (Unit)							
6	1 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Tersedia						
		a.							
		b.							
6	1 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia (Unit)						
6	1 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia						1.500.000
		a. Gorden (meter)		0					
		b. Tabung Pemadam Kebakaran (buah)		0				1	
		c. Air Conditioner (unit)							
6	1 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia						
		a. Lampu hias							
		b.							
6	1 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan		100	121.750.000		100	132.789.324
6	1 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat melalui jasa pengiriman (berkas)		5	3.000.000		5	2.750.000
			Jumlah Materai Tersedia (buah)		200			250	
6	1 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.550.000			16.261.324
		a. Jasa Internet Up to 50 Mbps Per Bulan (Bulan)			12			12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Jasa Layanan Air Bersih (m3)		0				0	
		b. Jasa Layanan Air Listrik (Kwh/Tahun)		5100				5100	
6	1 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor yang tersedia	3	103.200.000			3	113.778.000
6	1 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90	69.420.000			90	198.999.700
6	1 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		60.740.000				64.430.000
		a. Kendaraan Roda 4 (Unit)		1				1	
		b. Kendaraan Roda 2 (Unit)		7				8	
6	1 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Almari Mendapatkan Pemeliharaan						
		Jumlah Meja Biro Mendapatkan Pemeliharaan							
		Jumlah Meja 1/2 Biro Mendapatkan Pemeliharaan							
		Jumlah Kursi Kerja Mendapatkan Pemeliharaan							
6	1 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Mendapatkan Pemeliharaan		8.680.000				9.569.700
		a. Personal Computer/Lap Top (Unit)		10				10	
		b. Printer (Unit)		2				2	
6	1 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan						
		a.							
		b.							
6	1 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan (m2)	0				50	125.000.000
6	1 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan						
		a. Gorden							
		b. Tabung Pemadam Kebakaran							
6	1 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan						

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		a. Lampu hias							
		b.							



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa akan menjadi dokumen tahunan dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dimana Rancangan Akhir RKPD dimaksud akan menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Perubahan Renja menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan akhir RKPD, dengan pengecualian terdapat kebijakan nasional atau daerah yang memungkinkan terjadinya perubahan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan di luar Renja yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-4.

Tondano, Agustus 2022

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,



MAUDY N. LONTAAN, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661115 198602 1 002

LAMPIRAN 1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020 S/D 2021

TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020 S/D 2021

No.	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023 (Ablur Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai Dengan RPJPD Kabupaten Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan (Tahun 2021)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Kabupaten yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Ablur Tahun Pelaksanaan RPJPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14+15		15+16/8 x 100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				LINSUR PENGAWASAN DAURAN PEMERINTAHAN DAERAH																					
				INSPEKTORAT DAERAH																					
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	6 1 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	84,73	7.342.381.770	73,93	3.610.878.000	82,73	1.141.492.000	80,14	0	80,14	362.625.000			80,14	362.625.000	80,14	3.973.503.000	94,56	54,12			
				Jumlah Temuan BPK	100		38		14		0		0				0		38		263,16				
				Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)*	100		6		20		18		18				18		18		18,00				
				Persentase pelanggaran pegawai*	0,07		0,10		0,09		0		0				0,00		0,00		140,00				
		6 1 02 3.02	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APSP yang ditindaklanjuti	77	6.932.126.770	66,19	3.805.485.000	70	1.071.492.000		0	9,94	362.625.000			9,94	362.625.000	9,94	3.668.110.000	12,23	35,64			
				Jumlah Temuan APSP	841		200		160				99				99		388		46,25				
		6 1 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Perangkat Daerah	14	1.177.815.688	5	647.644.000	3	168.175.000			3	72.000.000			3	72.000.000	8	719.644.000	37,34	61,10			
				Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	106		67		33				43				43		110		66,27				
				Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	3		0		1				0				0		0		0,00				
				Jumlah Laporan Money Pelayanan Publik	3		1		1				0				0		1		33,33				
				Jumlah laporan probity audit dan audit kepatuhan	20		2		6				0				0		2		10,00				
		6 1 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Perangkat Daerah	345	2.926.368.543	116	1.455.018.000	57	466.725.000			57	254.250.000			57	254.250.000	173	1.709.268.000	50,34	58,41			
				Jumlah LHP Keuangan Dana BOS	166		69		25				0				0		69		41,57				
				Jumlah LHP Keuangan Dana Kelurahan	18		0		6				0				0		0		0,00				
		6 1 02 2.01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD	12	389.140.000	4	151.227.000	2	132.300.000			0	19.125.000			0	19.125.000	4	170.352.000	33,33	28,92			
				Jumlah Laporan Hasil Revisi RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	516		116		114				0				0		116		22,48				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (LAK) Pemerintah (LAKIP)	6		2		1				0				0		2		33,33				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Perubahan RPJMD	2		0		1				0				0		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Perubahan RPJPD	0		0		-				0				0		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Perubahan Renstra PD	1		0		1				0				0		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Perubahan Rencana PD	342		0		114				0				0		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Perubahan Rencana AP	6		0		2				0				0		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Pengadaan Barang/Jasa	16		0		4				0				0		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Dana Alokasi Khusus	124		40		28				5				5		45		36,29				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi LPPD	12		0		4				1				1		1		8,33				
		6 1 02 2.01 04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)	5	90.396.500	2	33.499.000	1	17.250.000		1	17.250.000				1	17.250.000	2	33.499.000	40,00	36,98			
		6 1 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa	130	1.790.648.500	66	987.808.000	22	242.350.000									66	987.808.000	50,77	35,16			
				Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan BUM Desa	20		0		-				-				-		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	132		0		-				-				-		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	4		0		-				-				-		0		0,00				
				Jumlah Laporan Hasil Revisi Raperdes APBD/Desa	454		0		-				-				-		0		0,00				
		6 1 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang pelaksanaannya merupakan kerjasama pengawasan dengan APSP lainnya	3		0		1				1				1		1		33,33				
		6 1 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	8	317.557.500	1	230.289.000	2	44.492.000			0				0		1	230.289.000	12,50	80,99			
				Jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APSP	18		5		4				0				0		5		27,78				
		6 1 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi kerugian negara/daerah atas hasil pengawasan APSP yang ditindaklanjuti	75	390.255.000	41,8	105.392.000	60	70.200.000			0				0		41,94	105.392.000	55,91	27,01			
				Jumlah Temuan APSP berimplikasi kerugian negara/daerah	113		31		30				14				14		45		39,13				
		6 1 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah	6	52.300.000	0		0	2			0				0		0		0,00				
		6 1 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif	67	317.755.000	20	105.393.000	12	70.200.000			0				0		20	105.393.000	29,85	31,20			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi	6 1 03	PROGRAM PERBURUHAN KERUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Sistem Pemeliharaan (APSP)	Level 3	1.337.936.140	Level 2	299.090.600	Level 2	321.101.432			Level 1	13.650.000			Level 1	13.650.000	Level 1	508.740.400	33,33	22,74			
				Tingkat Kematangan Implementasi SPSP	Level 3		Level 2		Level 2				Level 2				Level 2		Level 2		66,67				







	PreChat Kinerja	SAKSIAT TINGGI		
<b>Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja :</b>				
1. Belum adanya laporan RPI atau Timuan Hasil Penyerahan LKPD Tahun 2020				
2. Masih adanya dokumen Diklat Kepram yang sementara diproses dan belum diterbitkan				
<b>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :</b>				
1. Masih rendahnya jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi PreChat SAKIP B ke atas				
2. Masih rendahnya kapabilitas APW				
<b>Tindakan yang diperlukan dalam Tahunan Berikutnya :</b>				
1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan SAKIP Perangkat Daerah, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				
2. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan kapabilitas APW, termasuk Self Assessment				
<b>Tindakan yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya :</b>				